



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI X DPR RI KE PROVINSI ACEH
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 16 S.D. 20 DESEMBER 2022**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf (f) UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI; Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan; Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 1 November 2022 tentang rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI Masa Reses pada Masa Persidangan II tahun sidang 2022-2023 ke Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Aceh Besar.

B. Maksud dan Tujuan

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai implementasi undang-undang dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di Provinsi Aceh. Secara khusus, kunjungan ini bertujuan memantau secara langsung terhadap kendala dan permasalahan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dalam masa pandemi dan pasca Covid-19.

C. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI sebagai berikut:

| NO. | N A M A | JABATAN/FRAKSI | DAPIL |
|-----|------------------------------------|--|------------|
| 1. | H. SYAIFUL HUDA | Ketua Tim/Ketua Komisi X DPR RI/FPKB | Jabar VII |
| 2. | Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP | Anggota/Wk.Ketua Komisi X DPR RI/FPD | Kaltim |
| 3. | Dr. DEDE YUSUF ME,, ST, M.I.Pol | Anggota/Wk.Ketua Komisi X DPR RI/FPD | Jabar II |
| 4. | Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M. | Anggota/Wk.Ketua Komisi X DPR RI/FPKS | Jateng IX |
| 5. | dr. SOFYAN TAN | Anggota/ FPDIP | SUMUT I |
| 6. | PUTRA NABABAN | Anggota/ FPDIP | DKI I |
| 7. | Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA | Anggota/ FPDIP | NTT I |
| 8. | Dra. ADRIANA DONDOKAMBAY, M.Si | Anggota/FPDIP | Sulut |
| 9. | FERDIANSYAH, SE., MM. | Anggota/FPGolkar | Jabar XI |
| 10. | Dr. H.A. MUJIB ROHMAT, M.H. | Anggota/FPGolkar | Jateng I |
| 11. | H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI | Anggota/FPGolkar | Jatim IV |
| 12. | Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN | Anggota/FPGerindra | Sumut III |
| 13. | MARTINA, S.Ikom, M.Si | Anggota/PGerindra | Banten III |
| 14. | Dr. IR. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc | Anggota/FPGerindra | Jabar I |
| 15. | Ir. H. NUROJI | Anggota/FPGerindra | Jabar VI |
| 16. | RATIH MEGASARI SINGKARRU, MSc | Anggota/FPNasdem | Sulbar |
| 17. | Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M | Anggota/FPNasdem | Sultra |
| 18. | MOH. HAERUL AMRI, S.P. | Anggota/FPNasdem | Jatim II |
| 19. | Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H. | Anggota/FPKB | Lampung I |
| 20. | Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. | Anggota/FPKB | Jateng X |
| 21. | Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si | Anggota/FPKB | Sulsel II |
| 22. | H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS | Anggota/FPKB | Jatim VI |
| 23. | BRAMANTYO SUWONDO, M.M.IR | Anggota/FPD | Jateng VI |
| 24. | DEBBY KURNIAWAN, S.Kom | Anggota/FPD | Jatim X |
| 25. | HJ. LEDIA HANIFA A, S.SI., M.PSI.T | Anggota/FPKS | Jabar I |
| 26. | H. MUSTAFA KAMAL, S.S | Anggota/FPKS | Sumsel I |
| 27. | Dr. FAHMI ALAYDROES, M.M., M.Ed | Anggota/FPKS | Jabar V |
| 28. | Hj. SAKINAH ALJUFRI | Anggota/FPKS | Sulteng |
| 29. | Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si | Anggota/FPAN | Jatim X |
| 30. | MITRA FAKHRUDDIN MB, S.P | Anggota/FPAN | Sulsel III |
| 31. | Hj. ILLIZA SAADUDDIN DJAMAL, S.E. | Anggota/FPPP | Aceh I |
| 32. | H. ROJIH | Anggota/FPPP | Jateng II |

Tim kunker reses ke Provinsi Aceh didampingi oleh pejabat mitra kerja Komisi X DPR RI sebagai berikut:

1. Pejabat pendamping dari Kemendikbudristek RI, yaitu Aswin Wihdiyanto, S.T., M.A. selaku Plt. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
2. Pendamping dari Kemenparekraf/Baparekraf RI, yaitu Wawan Rusiawan selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Riwud Mujirahayu selaku Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.
3. Pendamping dari Kemenpora RI, yaitu Sekretaris Kemenpora Dr Gunawan Suswanto, Dr. Suroho, S.Pd., M.Pd. selaku Asdep Pembinaan Olahragawan Andalan, dan dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj, selaku Asdep Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi.
4. Pendamping dari Perpustakaan Nasional RI, Dr. Taufiq A Gani, S.Kom., M.Eng.Sc. selaku Kepala Pusat Data dan Informasi, Emiyati Tangkelembang, S.Sos. selaku Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, dan Drs. Nurcahyono, S.S., M.Si. selaku Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi.

Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Tim pemberitaan dari Bagian Media Cetak dan Sosial, serta Bagian TV dan Radio Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

- a. Pemda Provinsi Aceh memberikan masukan terhadap program prioritas Kemendikbudristek RI terutama dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, namun masukan tersebut tidak disertakan data kuantitatif.
 - 1) Untuk Program Indonesia Pintar, masih tersisa 31,7% siswa SMA yang belum melakukan aktivasi dan pencairan dana PIP. Pemda kesulitan memberikan dorongan kepada siswa untuk melakukan aktivasi/pencairan dana PIP agar bisa mencapai target yang telah ditentukan.
 - 2) Untuk penyaluran dana BOS, Pemda Provinsi menyampaikan bahwa penyaluran dana BOS sejauh ini telah tepat sasaran yaitu pada fokus pemenuhan 8 standar pendidikan. Penggunaannya telah sesuai dengan ARKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) sehingga dapat menunjang pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dan juga meningkatkan prestasi mutu pendidikan baik akademik maupun non akademik. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh juga melakukan monitoring dan evaluasi aktif terhadap penggunaan dana BOS di level sekolah. Proses ini dilakukan untuk meminimalisir potensi kecurangan penggunaan dana BOS di tingkat satuan pendidikan. Dengan upaya ini, Dinas Pendidikan Aceh berharap dapat membantu Pemerintah Pusat dalam memastikan bahwa Dana BOS telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

- 3) Terhadap penyaluran DAK, Pemda Provinsi menyampaikan pelaksanaan telah berjalan dengan baik. Namun, kebutuhan peralatan dan ruang praktik SMK terlalu lama terealisasi, sehingga SMK tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai tuntutan Kurikulum Merdeka.

Catatan:

Dalam jawaban tertulis, Pemda mencantumkan tautan website terkait data, namun tautan tersebut tidak diakses. (<https://bit.ly/3WI596n>)

- 4) Penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik untuk SMA, Pemda Provinsi Aceh menyampaikan sebagai berikut:
 - a) Kecilnya pagu anggaran fisik memaksa penyesuaian harga yang tidak ideal. Program ini perlu menyesuaikan dengan harga daerah kabupaten/kota masing-masing dengan harga yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Khusus untuk daerah pedalaman dan kepulauan seperti Pulau Sabang, Pulau Aceh, Pulau Banyak dan Pulau Simeulue, tim dari DAK perlu untuk melakukan survei harga yang lebih akurat.
 - b) Perlunya sistem Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang lebih cepat untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.
 - c) Biaya pengelolaan kegiatan yang diberikan oleh pusat terlalu rendah dan belum mencakup semua kegiatan secara merata.
 - d) Bahan/material tiap tahunnya terjadi kenaikan sehingga perlu penyesuaian dengan *Detail Engineering Design* (DED)
- 5) Terkait kebijakan Kurikulum Merdeka, secara umum sekolah di Aceh masih belum berani untuk melepas skema kurikulum sebelumnya karena takut akan ketidaksesuaian sarana, sumber daya manusia dari para guru dan juga tingkat pencapaian yang lebih rumit. beberapa sekolah, Kurikulum Merdeka telah memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk dapat fokus terhadap peserta didik sehingga dapat menyesuaikan dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Dalam hal ini Pemda sudah menyesuaikan menjadi Kurikulum Aceh yang diterapkan pada Tahun 2022. Namun kurikulum ini belum didukung dengan baik terutama pada pengakuan dan legalitas kurikulum itu sendiri dalam DAPODIK (Aplikasi Data Pokok Pendidikan).
- 6) Proses Penerimaan Peserta Didik Baru secara umum berjalan tanpa hambatan. Namun, mengingat tingkat literasi digital yang masih belum merata di Aceh, proses pelaksanaannya masih dilaksanakan secara semi *online*. Beberapa sekolah telah menggunakan platform berbasis internet untuk mengurai proses PPDB sementara beberapa sekolah lainnya masih terpaku dengan proses yang melibatkan kertas dan form pendaftaran. Permasalahannya adalah tidak tersedianya anggaran khusus untuk PPDB pada tingkat Dinas Pendidikan Aceh. Namun, realita ini diharapkan akan dapat berubah di tahun 2023 mengingat Dinas Pendidikan Aceh secara aktif sedang mengembangkan aplikasi PPDB *online* dengan mengupayakan anggaran dari pihak ketiga.
- 7) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Pemda Provinsi Aceh membutuhkan bantuan sarana prasarana praktek keterampilan untuk siswa berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus tahun 2022 terus diupayakan

peningkatan mutu SDM dengan disalurkannya bantuan biaya makan minum peserta didik berkebutuhan khusus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri maupun swasta berasrama di provinsi Aceh.

Antusiasme peserta didik dalam mengikuti ajang kreativitas juga mengalami peningkatan, terlihat dari presentase keikutsertaan pada ajang kompetisi Reguler (FLS2n, KOSN dan LKSN) untuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dan kompetisi mandiri (AKA-PDBK) dibandingkan tahun lalu. Dua orang peserta didik juga meraih medali emas dan perunggu pada KOSN tingkat Nasional.

- 8) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi (SMK) Aceh dilaksanakan sesuai dengan UU Sisdiknas, UU PA, Qanun Penyelenggaraan Pendidikan, serta sesuai dengan Pergub Aceh Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kurikulum Berbasis Teknologi dan Kewirausahaan yang Islami pada SMK Aceh. Terkait kekhususan Aceh, Pemda Provinsi Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan SMK, yaitu (1) Pergub Aceh nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Pada Disdik Aceh dan (2) Pergub Aceh nomor 36 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada SMK Negeri. Kedua Pergub Aceh ini dapat menjamin fleksibilitas pengelolaan keuangan Unit Produksi yang berlangsung pada pelaksanaan *Teaching Factory* yang diharapkan bisa menghasilkan siswa yang kompeten dan *income generating*.
- b. KIP Kuliah di Aceh terkesan masih sangat kurang dipahami bentuknya oleh banyak siswa SMA. Beasiswa ini masih kurang menyentuh banyak calon-calon mahasiswa yang membutuhkan. Catatan khusus perlu diarahkan pemerintah dalam bentuk promosi yang lebih gencar dan juga penambahan kuota khususnya pada daerah 3T.
- c. Untuk pelaksanaan rekrutmen Guru ASN PPPK, Pemda Provinsi Aceh menyampaikan bahwa pelaksanaan tersebut berjalan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Namun dalam hal pengelolaan Guru dan Tendik, Pemerintah Provinsi Aceh menghadapi kesulitan. Pemda mengharapkan Pemerintah Pusat cq Kemendikbudristek RI tetap sebagai pemegang kebijakan umum dan supervisor utama, namun pengelolaan teknis GTK secara mandiri tetap menjadi ranah kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan di tingkat satu adalah pihak yang mengerti secara mendalam tentang kebutuhan dan skema pemerataan guru dan tenaga kependudukan. Kami berharap bahwa pengelolaan GTK dapat sepenuhnya diserahkan ke daerah karena akan mempermudah penyelesaian masalah dan juga memperkecil potensi ketimpangan penyebaran guru.
- d. Pemerintah Provinsi Aceh menyampaikan bahwa kebijakan Merdeka Belajar disambut baik oleh para guru di Aceh, dibuktikan hampir 90% guru memiliki akun belajar.id dan merdeka mengajar. Meski angka partisipasi aktif para guru asal Aceh di kedua platform tersebut tidak bisa terdeteksi,

Dinas Pendidikan Aceh mengamati adanya perbaikan motivasi dan kemauan dari para guru untuk belajar.

- e. Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh telah menyiapkan beberapa ekosistem pendidikan yang diharapkan bisa menjadi ekosistem yang diisi oleh para guru inti dan guru penggerak. Ikhtiar ini juga diharapkan dapat memberi dampak pada suasana sekolah yang menyenangkan, melatih keterbukaan dalam melakukan kolaborasi, dan meningkatkan tingkat keterlibatan aktif dari orang tua dan masyarakat.
- f. Bidang PGTK, Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh juga telah melakukan cukup banyak pelatihan, bimbingan teknis dan berbagai upaya berbentuk eksplorasi ilmu dengan harapan bahwa guru tidak lahi semata-mata berperan sebagai penyampai informasi, namun juga sebagai fasilitator kegiatan belajar. Sekolah PAUD di Aceh telah mulai menitikberatkan proses pada kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter, dan akomodatif. Selain itu, sistem penilaian juga disiapkan dalam sifat yang formatif untuk mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran.
- g. Terkait masukan terhadap substansi perubahan UU Sisdiknas, Pemerintah Provinsi Aceh menyampaikan bahwa substansi pembiayaan pendidikan perlu diatur secara tegas dan jelas, yaitu biaya pendidikan yang dikelola satuan pendidikan (sekolah) harus sebanding dengan kebutuhan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikannya sesuai standar yang telah ditetapkan. Kebijakan ini harus memaksa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembiayaan dalam APBDnya.

2. Bidang Kebudayaan

Pemerintah Provinsi Aceh tidak menyampaikan jawaban tertulis terkait beberapa pertanyaan bidang kebudayaan yang telah dikirimkan sebelum pelaksanaan kunjungan kerja masa reses.

3. Bidang Pariwisata

Pemerintah Provinsi Aceh tidak menyampaikan jawaban tertulis terkait beberapa pertanyaan bidang pariwisata yang telah dikirimkan sebelum pelaksanaan kunjungan kerja masa reses.

4. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

- a. Di bidang pemberdayaan kepemimpinan, Pemerintah Provinsi Aceh telah melakukan berbagai pelatihan peningkatan kualitas kepemimpinan kepemudaan di antaranya kegiatan pelatihan *leadership* atau seminar.
- b. Di bidang pembinaan kewirausahaan, Pemerintah Provinsi Aceh selain membuat program pelatihan dan pembinaan kewirausahaan kepemudaan, juga memberikan bantuan kepada pemuda yang mempunyai potensi kewirausahaan baik dalam bentuk modal maupun barang.
- c. Di bidang pembinaan organisasi kepemudaan, Pemerintah Provinsi Aceh memberikan bantuan operasional bagi organisasi dalam bentuk hibah dan pelatihan tata kelola organisasi.

- d. Di bidang pembinaan olahraga prestasi, Pemerintah Provinsi Aceh melakukan berbagai program peningkatan prestasi di antaranya pemusatan latihan daerah (Pelatda) untuk persiapan menghadapi PON 2024 yang akan dilaksanakan di Aceh-Sumut.
- e. Pembinaan Pramuka di Provinsi Aceh dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun dalam bentuk pemberian dana hibah yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepramukaan di Provinsi Aceh.
- f. Terkait persiapan penyelenggaraan PON XXI di Provinsi Aceh – Sumatera Utara, beberapa tahapan persiapan sudah dilakukan di antaranya:
 - 1) Telah menyelesaikan Master Plan pembangunan stadion utama dan beberapa Gedung pendukung untuk *venue* pertandingan di Universitas Syiah Kuala 2. Adapun pengusulan proposal anggarannya sudah disampaikan kepada Pemerintah.
 - 2) Proses penyusunan Pergub PON Aceh masih dalam tahap penyusunan.
 - 3) Pembuatan Akte PB PON Aceh masih tahap proses.
 - 4) Dan banyak hal masih dalam tahap proses.

5. Bidang Perpustakaan

- a. Terhadap upaya pengembangan dan penambahan koleksi pustaka kuno, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh beberapa tahun terakhir telah melakukan upaya ganti rugi naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat.
- b. Jumlah perpustakaan umum sekitar 427 yang terdiri dari 1 Perpustakaan Provinsi, 23 Perpustakaan Kabupaten, 22 Perpustakaan Kecamatan, dan 381 Perpustakaan Desa/Gampong yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota. Sedangkan jumlah perpustakaan khusus sekitar 147 perpustakaan yang juga tersebar di 23 Kabupaten/Kota
- c. Hingga saat ini akhir tahun 2022 pustakawan di Dinas Perpustakaan dan kearsipan Aceh berjumlah 46 orang dengan rincian 36 orang fungsional pustakawan dan 8 orang fungsional pustakawan penyetaraan. Sedangkan SDM perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang terdiri dari fungsional pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan berjumlah 67 orang.
- d. Provinsi Aceh sudah melaksanakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di 15 kabupaten kota yaitu Aceh Besar, Aceh Tengah, Bener Meriah, Nagan Raya, Aceh Barat, Bireuen, Gayolues, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Kota Langsa, Lhokseumawe dan Subulussalam. Program TPBIS merupakan salah satu program Pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan perpustakaan di daerah.
- e. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah berjalan di Provinsi Aceh sejak akhir tahun 2018. Hingga saat ini sudah 15 kabupaten/kota sudah melakukan transformasi perpustakaan inklusi bahkan sudah diperluas ke beberapa perpustakaan desa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah mereplikasi 68 perpustakaan desa, dengan rincian pada tahun 2019 sebanyak 20 perpustakaan desa, tahun 2021 sebanyak 20 perpustakaan desa dan tahun 2022 sebanyak 28 perpustakaan desa dengan menggunakan Anggaran Pembelanjaan Belanja Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- f. Dinas Perpustakaan dan kearsipan Aceh telah menerbitkan 2 (dua) regulasi yang terkait implementasi dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi di Provinsi Aceh yaitu Peraturan Gubernur Aceh nomor 86 Tahun 2019 tentang Transformasi dan Inovasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Aceh dan Instruksi Gubernur Aceh nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Aceh.
- g. Berbagai upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh dalam mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan layanan perpustakaan kepada masyarakat di antaranya:
 - 1) Melaksanakan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara daring;
 - 2) Melaksanakan Sosialisasi Regulasi (Pergub dan Ingub) Transformasi ke Kabupaten/Kota bagi para kepala desa/aparatur desa;
 - 3) Menyarankan kabupaten/kota untuk membuat Regulasi turunan (Perbub/Perwali) Transformasi Perpustakaan Inklusi;
 - 4) Dalam rangka monitoring ke perpustakaan desa, Tim Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh langsung menemui kepala desa untuk mensosialisasikan Pergub dan Ingub Transformasi Perpustakaan Inklusi serta menganjurkan agar mengalokasikan sebagian dana desa untuk perpustakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 minimal 5%.
 - 5) Adanya ketegasan dari kepala daerah setempat dalam penggunaan dana desa sebanyak 5 % untuk perpustakaan desa.
 - 6) Terus mengawasi pemantapan anggaran untuk memenuhi kebutuhan koleksi sesuai dengan standar nasional.

B. Kunjungan Lapangan

| Lokasi | Temuan data |
|--|--|
| Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh Beralamat di Jalan T. Nyak Arief Lamnyong Banda Aceh No. 8 Jeulingke Banda Aceh | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh, memiliki jumlah koleksi dan anggota sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki anggota/member 31.903, jumlah buku 62.799 dan secara keseluruhan memiliki koleksi 286.022 eksemplar b. Aplikasi IPustaka Aceh, memiliki anggota/member 2.802 dan koleksi buku 74.815 2. Memiliki jenis-jenis layanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Informasi b. Layanan Administrasi dan Keanggotaan c. Layanan Sirkulasi d. Layanan Baca Di Tempat e. Layanan Referensi f. Layanan Perpustakaan Keliling g. Layanan Bimbingan Pemakai h. Layanan Majalah/Surat Kabar i. Layanan Perpustakaan Digital/Ebook |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki koleksi deposit seperti, koleksi agama, sosial (adat istiadat, cerita rakyat, qanun Aceh), sastra bahasa Aceh dan hikayat, surat kabar lokal, literatur sekunder dan grey literatur. 4. Memiliki koleksi digital di aplikasi berikut: iPustaka Aceh, e-Pustaka Aceh serta Indonesia OneSearch. 5. Beberapa kegiatan layanan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2021, di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan penerapan aplikasi INLisLite b. Workshop <i>Storytelling</i> c. Kampanye membaca d. Pemilihan Raja dan Ratu Membaca e. Seminar Nasional Perpustakaan f. Lokakarya Literasi g. Layanan Perpustakaan Sabtu dan Minggu h. Layanan Perpustakaan Keliling 6. Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh dibangun dengan rencana pembangunan setinggi 4 lantai, dibangun sejak tahun 2018 dan sampai sekarang belum selesai. 7. Pembangunan Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh menggunakan dana otonomi khusus (Otsus) yang telah berjalan selama lima tahun penganggaran. Di dalam perencanaan pembangunan seharusnya sudah selesai di tahun 2020, namun karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, pembangunan Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh saat ini baru rampung 90%. 8. Karena masih dalam tahap pembangunan, layanan perpustakaan secara normal dimulai pada bulan Maret tahun 2022. Pengembangan layanan perpustakaan memiliki konsep perpustakaan modern dengan <i>branding</i> Mall Baca agar masyarakat bisa lebih cinta dan gemar membaca. |
|--|--|

C. Pembahasan Berupa Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Daerah serta Tanggapan Komisi dan Pemerintah

1. Perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam kesempatannya menyampaikan aspirasi perlu adanya perhatian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran peningkatan layanan pada bidang deposit dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, khususnya layanan informasi muatan lokal.
2. Perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh dalam kesempatannya menyampaikan informasi dan aspirasi di antaranya:
 - a. Setiap tahun Pemerintah Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran dalam bentuk hibah untuk pembinaan pramuka Aceh. Pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 8 milyar.
 - b. Proses persiapan penyelenggaraan PON XXI di Provinsi Aceh sudah berjalan baik, untuk saat ini telah menyelesaikan tahap penyusunan

master plan penyediaan fasilitas prasaran PON di area Gampong Neuhuen Kabupaten Aceh Besar.

- c. Memohon dukungan dari Komisi X DPR RI dan Pemerintah untuk segera melakukan renovasi dan pengadaan infrastruktur untuk pelaksanaan PON XXI yang direncanakan dilaksanakan pada bulan September 2024.
3. Perwakilan Kwarda Pramuka Aceh Ismet Ali Hasan dalam kesempatannya menyampaikan permohonan dukungan secara moral dan anggaran dana untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional Pramuka pada tanggal 13 s/d 17 Oktober 2023 di Provinsi Aceh yang direncanakan akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh dalam kesempatannya menyampaikan informasi dan aspirasi di antaranya:
 - a. Pemerintah Provinsi Aceh telah memberikan dukungan pengembangan pariwisata di Provinsi Aceh, dampaknya pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan di destinasi-destinasi dan kontribusi pariwisata bagi daerah telah mendekati target, hal ini juga disebabkan telah terkendalinya penyebaran Covid-19 membuat kondisi pariwisata Provinsi Aceh mulai membaik.
 - b. Pada tahun 2022, terhitung hampir 100 kegiatan, even dan atraksi pariwisata sudah dilaksanakan dan telah mendorong peningkatan aktifitas sektor pariwisata di Provinsi Aceh.
 - c. Terkait penyusunan RUU Kepariwisata, berharap sektor ekonomi kreatif diselaraskan bersama dengan industri pariwisata.
5. Ketua Badan Promosi Daerah (BPPD) Provinsi Aceh dalam kesempatannya menyampaikan:
 - a. BBPD Provinsi Aceh telah melakukan Rakor pariwisata di Kabupaten Sabang, yang memutuskan pengembangan pariwisata Aceh akan berorientasi pada pariwisata berkualitas tidak hanya pariwisata kuantitas. Menargetkan agar wisatawan melakukan *spending time* dan *money* lebih banyak di Aceh.
 - b. Menargetkan untuk mengidentifikasi destinasi wisata dan menyiapkan konsep pariwisata dengan melibatkan akademisi.
 - c. Masih terdapat kendala pendanaan promosi pariwisata karena persoalan numenklatur birokrasi.
 - d. Pariwisata Provinsi Aceh sedang berbenah untuk membuka akses langsung wisatawan mancanegara ke Provinsi Aceh. Hal yang sedang dilakukan di antaranya:
 - 1) Pada tanggal 3 Agustus 2022, telah dibuka penerbangan langsung dari Kuala Lumpur Malaysia ke Banda Aceh pada tanggal 3 Agustus 2022 sebanyak 5 penerbangan perhari.
 - 2) 7 November 2022, Air Asia menambah 2 jadwal penerbangan perhari Kuala Lumpur Malaysia ke Banda Aceh, dan
 - 3) Batik Air telah membuka 3 jadwal penerbangan/minggu 3 Kuala Lumpur Malaysia ke Banda Aceh.
 - 4) BPPD Aceh telah menyiapkan Tourist Information Center (TIC) untuk memberikan informasi destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara dan nusantara.

6. Komisi X DPR RI melalui Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin, Dr. H. Muhammad Khadafi, S.H., M.H., Ir. H. Nuroji, dan Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M., Med menyampaikan beberapa hal di antaranya:
 - a. Mendorong agar dalam setiap pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi X DPR RI bersama Pemerintah memeriksa anggaran yang telah dikucurkan dan outputnya, agar menjadi bahan evaluasi pembahasan bersama Pemerintah Daerah.
 - b. Mendorong agar Pemerintah Provinsi, Kwarda Pramuka Aceh dan Kemenpora RI segera berkoordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan Munas Pramuka di Provinsi Aceh pada tahun 2023.
 - c. Menyetujui agar dalam penyusunan RUU Kepariwisata disinkronisasikan dengan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
 - d. Mendorong agar dilaksanakan diskusi lebih lanjut antara Kemenparekraf RI dan Kemendagri RI terkait terdapatnya perbedaan nomenklatur kedinasan pariwisata dengan sektor lain, dan status sektor pariwisata apakah masih menjadi tugas pilihan atau wajib.
 - e. Mengharapkan agar persiapan pelaksanaan PON dilaksanakan sebaik mungkin utamanya persiapan pendanaan dan akuntabilitasnya, baik sebelum dan setelahnya. Selain itu, berharap pelaksanaan PON XXI di Aceh dan Sumut menjadi pintu masuknya wisatawan dan masyarakat untuk berkunjung ke Provinsi Aceh, maka perlu sinergitas lintas sektor seperti bidang pendidikan, ekraf, pariwisata dan olahraga.
 - f. Provinsi Aceh memiliki warisan budaya tak benda (UNESCO), yaitu Tari Saman yang merupakan modal atau aset untuk dipromosikan sebagai daya tarik wisata pariwisata selain Museum Tsunami Aceh, Masjid Baiturrahman dan tradisi kopi Aceh (perlu mempersiapkan *story telling* Kopi Aceh)

D. Permasalahan dan Temuan

1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

- a. Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) perlu diubah menjadi program BOPS (Biaya Operasional Pendidikan Sekolah), didalamnya sudah memperhitungkan *unit cost* per siswa yang bertambah/memadai sesuai kebutuhan peningkatan mutu sekolah.
- b. Peningkatan Mutu Guru yang selama ini hanya dilakukan oleh Balai Besar saja dan tidak melibatkan kebutuhan khas daerah. Pemerintah Provinsi Aceh berharap bahwa proses pembinaan ini perlu melalui proses *redesign* agar kebutuhan guru di daerah dapat terlayani dengan baik.
- c. Peningkatan dan pembiayaan Guru Produktif SMK perlu intervensi oleh Pemerintah Pusat agar mutu dan jumlahnya dapat terpenuhi.
- d. Guru SLB di daerah juga perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat terutama untuk meningkatkan keterampilannya.
- e. Program revitalisasi SMK diharapkan bisa berlanjut agar skema *reengineering* yang sudah disiapkan bisa semakin meningkatkan daya saing lulusan SMK di Aceh.
- f. Penyelenggaraan Asesmen Nasional perlu dikembalikan ke level Provinsi karena realita yang ada saat ini, ada terlalu banyak oknum yang tidak

kooperatif setelah pendanaan ini dipusatkan dan terbagi di daerah tingkat dua.

- g. Program Kepala Sekolah Penggerak diharapkan bisa dibuka secara umum karena ada cukup banyak kepala sekolah yang kecewa karena hanya lulus dengan status cadangan.
- h. Kemendikbudristek RI perlu memberikan lebih banyak keleluasaan pada Dinas Pendidikan di level provinsi dalam hal penggunaan aplikasi DAPODIK dan beberapa platform *database* Kementerian lainnya. Keterbatasan ini telah membuat banyak kegaduhan karena ada banyak guru yang kecewa dengan detail data mereka di DAPODIK.

2. Bidang Kebudayaan

Pemerintah Provinsi Aceh tidak menyampaikan jawaban tertulis maupun secara lisan dalam forum, terkait beberapa pertanyaan bidang kebudayaan yang telah dikirimkan sebelum pelaksanaan kunjungan kerja masa reses.

3. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

Terdapat kendala utama dalam pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Aceh di antaranya harga barang perangkat pelatihan olahraga yang mahal dan sulit didapatkan, sehingga pelaksanaan pelatihan dan pertandingan eksebis atau Kejurda menggunakan prasarana alat bertanding yang belum sesuai standar pertandingan.

4. Bidang Perpustakaan

- a. Anggaran untuk ganti rugi naskah kuno milik masyarakat yang diambil alih belum teralokasi secara maksimal.
- b. Dalam hal pengelolaan naskah kuno, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas serta ruang penyimpanan.
- c. Pengelolaan koleksi deposit selama ini belum terkelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan, hal ini juga disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
- d. Permasalahan dan kendala lain dalam pengelolaan perpustakaan di Provinsi Aceh, di antaranya:
 - 1) Terbatasnya anggaran untuk Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang merupakan bagian dari replikasi program;
 - 2) Belum semua kabupaten/kota membuat regulasi turunan dari Pergub dan Ingub Transformasi hanya Kabupaten Nagan Raya yang telah membuat Perbub Transformasi;
 - 3) Dana desa yang seharusnya 5% bisa digunakan untuk perpustakaan desa tapi belum dianggarkan oleh aparat desa sehingga kegiatan pelibatan perpustakaan di perpustakaan desa tidak terlaksana;
 - 4) Tidak adanya honorarium bagi pengelola perpustakaan desa sehingga perpustakaan desa sering ditutup;
 - 5) Minimnya sarana dan prasarana di perpustakaan desa;
 - 6) Masih banyaknya koleksi buku yang belum terpenuhi sesuai dengan permintaan pemustaka dan perlu peningkatan sarana dan prasarana.

III. KESIMPULAN

A. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

Pemerintah Provinsi Aceh telah melaksanakan kebijakan bidang pendidikan terutama program prioritas, namun beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat, antara lain:

- a. Perlunya bantuan untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK dan PKLK.
- b. Penetapan pagu anggaran DAK Fisik suatu daerah perlu mempertimbangkan, antara lain: (i) menyesuaikan harga bahan material di kabupaten/kota atau di daerah kepulauan; (ii) adanya variabel biaya lainnya sehingga pagu anggaran mencakup semua kegiatan secara merata; dan (iii)antisipasi kenaikan harga setiap tahun sehingga perlu penyesuaian dengan *Detail Engineering Design* (DED).
- c. Kebijakan perluasan akses pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah di Provinsi Aceh kurang mendapatkan respon dari siswa SMA. Meski tidak menyampaikan data persentase daya serap KIP Kuliah, namun Pemda Provinsi meminta adanya penambahan kuota KIP Kuliah untuk daerah 3T.
- d. Terkait data guru, perlu adanya pemahaman yang sama dalam penggunaan aplikasi Dapodik dan platform database guru di kementerian lainnya.

B. Bidang Pariwisata

Pemerintah Provinsi Aceh telah memberikan dukungan pengembangan pariwisata di Provinsi Aceh, dampaknya pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan di destinasi-destinasi wisata dan kontribusi pariwisata bagi daerah telah mendekati target. Pada tahun 2022, terhitung hampir 100 kegiatan, even dan atraksi pariwisata sudah dilaksanakan telah mendorong peningkatan aktifitas sektor pariwisata di Provinsi Aceh. Adapun terkait penyusunan RUU Kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh berharap sektor ekonomi kreatif diselaraskan bersama dengan industri pariwisata.

C. Bidang Kepemudaan

Pemerintah Provinsi Aceh telah melakukan berbagai program pembinaan pemuda seperti pemberdayaan kepemimpinan, kewirausahaan pemuda, serta dukungan pembinaan organisasi kepemudaan berupa bantuan operasional dalam bentuk hibah dan dan pelatihan tata kelola organisasi. Terkait pembinaan pramuka, Kwarda Pramuka Provinsi Aceh meminta dukungan Pemerintah Pusat berupa anggaran dana untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional Pramuka pada tanggal 13 s/d 17 Oktober 2023 di Provinsi Aceh yang direncanakan akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.

D. Bidang pembinaan olahraga prestasi

Pemerintah Provinsi Aceh melakukan berbagai program peningkatan prestasi di antaranya pemusatan latihan daerah (Pelatda) untuk persiapan menghadapi PON 2024 yang akan dilaksanakan di Aceh-Sumut. Namun menghadapi kendala utama di antaranya harga barang perangkat pelatihan olahraga yang mahal dan sulit didapatkan, sehingga pelaksanaan pelatihan dan pertandingan eksebisi atau Kejurda menggunakan prasarana alat bertanding yang belum sesuai standar pertandingan.

Terkait persiapan penyelenggaraan PON XXI di Provinsi Aceh – Sumatera Utara, beberapa tahapan persiapan sudah dilakukan di antaranya, (1) telah menyelesaikan Master Plan pembangunan stadion utama dan beberapa Gedung pendukung untuk *venue* pertandingan di Kampus 2 Universitas Syiah Kuala, (2) menyelesaikan tahap penyusunan *master plan* penyediaan fasilitas prasarana PON di area Gampong Neuhuen Kabupaten Aceh Besar, (3) proses penyusunan Pergub PON Aceh masih dalam tahap penyusunan, (3) pembuatan Akte PB PON Aceh masih tahap proses. Pemerintah Provinsi Aceh memohon untuk segera dilakukan renovasi dan pengadaan infrastruktur untuk pelaksanaan PON XXI

E. Bidang Perpustakaan dan Literasi

Penyelenggaraan layanan perpustakaan di Provinsi Aceh tergolong baik dari sisi jumlah sebaran perpustakaan di daerah, kesiapan SDM tenaga pustakawan dan tenaga teknis. Provinsi Aceh sudah melaksanakan program perpustakaan inklusi melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di 15 kabupaten/kota, dan sebagai bentuk dukungan regulasinya, Dinas Perpustakaan dan kearsipan Aceh telah menerbitkan 2 (dua) regulasi yang terkait implementasi dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi di Provinsi Aceh yaitu Peraturan Gubernur Aceh nomor 86 Tahun 2019 tentang Transformasi dan Inovasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Aceh dan Instruksi Gubernur Aceh nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Aceh.

Layanan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Aceh memiliki kendala di antaranya (1) penyelesaian pembangunan perpustakaan dan kearsipan mengalami keterlambatan penyelesaian 2 tahun karena adanya realokasi untuk penanganan pandemi COVID-19, (2) anggaran ganti rugi pengambilalihan pustaka kuno milik masyarakat belum maksimal dan minimnya sarana prasarana perawatan pustaka kuno, (3) pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan desa belum terkelola dengan baik.

IV. REKOMENDASI

A. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI mengevaluasi kembali kegiatan sosialisasi program prioritas terutama pendampingan kepada pemda, mengingat masih terdapat program prioritas yang belum terserap dengan baik, antara lain KIP Kuliah.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana SMK, antara lain ruang praktik dan peralatannya, untuk memenuhi tuntutan Kurikulum Merdeka.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI membuat skema pendampingan untuk daerah, mengenai *input/output* data guru pada aplikasi Data Pokok Pendidikan dan integrasinya dengan *database* K/L lain terkait status kepegawaian guru.

B. Bidang Pariwisata

1. Mendorong Panja RUU Kepariwisata agar dalam penyusunan RUU Kepariwisata disinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
2. Mendorong agar dilaksanakan diskusi lebih lanjut antara Kemenparekraf RI dan Kemendagri RI terkait terdapatnya perbedaan nomenklatur kedinasan

pariwisata dengan sektor lain di daerah, dan status sektor pariwisata apakah masih menjadi tugas pilihan atau wajib.

3. Mendorong pelaksanaan PON XXI di Aceh dan Sumut menjadi pintu masuknya wisatawan dan masyarakat untuk berkunjung ke Provinsi Aceh, maka perlu sinergitas lintas sektor seperti bidang pendidikan, ekraf, pariwisata dan olahraga.

C. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk mengadakan kembali program-program kepeloporan pemuda sebagai sarana pembinaan bagi pemuda di daerah yang terhenti akibat pandemi Covid-19.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI, KONI, KemenPUPR dan K/L terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur olahraga pendukung pelaksanaan PON XXI di Provinsi Aceh – Sumatera Utara tahun 2024, dan mengharapkan agar persiapan pelaksanaan PON XXI 2024 dilaksanakan sebaik mungkin utamanya terkait penggunaan anggaran dan akuntabilitasnya, baik sebelum dan setelahnya.
3. Mendorong agar Pemerintah Provinsi, Kwarda Pramuka Aceh dan Kemenpora RI segera berkoordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan Munas Pramuka di Provinsi Aceh pada tahun 2023.

D. Bidang Perpustakaan dan Literasi

1. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI untuk meningkatkan fasilitas pendukung untuk kenyamanan pengunjung dan dukungan layanan perpustakaan Ipusnas dengan memperbanyak konten-konten lokal dan memperluas jangkauan kepada masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas melalui program transformasi perpustakaan inklusi.
2. Komisi X DPR RI mendorong percepatan penyelesaian pembangunan perpustakaan dan kearsipan Provinsi Aceh yang mengalami keterlambatan penyelesaian selama 2 tahun karena adanya realokasi untuk penanganan pandemi Covid-19.
3. Komisi X DPR RI mendorong agar Perpustakaan RI berkoordinasi dengan Kemendes PDTT agar pembinaan perpustakaan desa menjadi skala prioritas dalam pemanfaatan dana desa.

V. PENUTUP

Demikian laporan ini Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Aceh, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 10 Januari 2023

Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X
DPR RI

Ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
A-338